



REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Menuntaskan Program Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan 2013-2014

**direktorat
dayaan**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10-13 Februari 2013**

353.3
REM
r



REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menuntaskan Program Prioritas
Pendidikan dan Kebudayaan 2013-2014

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10-13 Februari 2013

KATA PENGANTAR

Selamat Datang di Rembuknas 2013

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 ini mengangkat tema: **“Menuntaskan Program Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013-2014”**. Dengan tema ini, seluruh peserta yang terdiri atas semua pengelola pendidikan dan kebudayaan (Pejabat Kemdikbud, Kepala Dinas, Rektor, dan Praktisi Pendidikan) melakukan koordinasi dan membangun komitmen untuk menuntaskan program prioritas pendidikan dan kebudayaan. Dalam Rembuknas ini peserta juga akan merumuskan kebijakan terkait dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di masa akan datang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam Rembuknas 2013 ini peserta akan mendapatkan arahan dari Wakil Presiden RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang kemudian dilanjutkan dengan sidang pleno dan sidang komisi yang mengangkat topik tentang:

1. Persiapan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kurikulum 2013;
2. Melaksanakan Amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 (Akademi Komunitas dan BOPTN);
3. Melestarikan dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Diplomasi Budaya;
4. Tata Kelola Sumber Daya Pembangunan Dikbud: RSBI/SBI, Revisi PP No. 74 Tahun 2008, RBI, Dekon, DAK, BOS, Penataan Asset, Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan;
5. Implementasi Pendidikan Menengah Universal (PMU).

Dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan ini, akan dilaksanakan Penandatanganan Kontrak Kinerja antara Menteri dengan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon I dengan Perwakilan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pusat di Daerah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan mengikuti acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan secara penuh, juga kepada semua panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk suksesnya kegiatan ini. Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan ini, kami menyampaikan permohonan maaf.

Selamat Berembuk.

Jakarta, Februari 2013
Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Penyelenggara,



Ainun Na'im

Nip. 196012041986011001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tema	3
D. Maksud dan Tujuan.....	3
E. Hasil yang Diharapkan	4
F. Peserta.....	5
G. Substansi dan Bahan	6
H. Persidangan	7
I. Pembagian dan Pengorganisasian Komisi.....	9
J. Skenario Pelaksanaan RNPk 2013	12
K. Mekanisme Pelaksanaan	12
L. Penyelenggaraan	15
M. Informasi Lain.....	16

Lampiran:

1. Jadwal Acara RNPk 2013
2. Daftar Nama Peserta Sidang Komisi I s.d V
3. Salinan Surat Keputusan Kepanitiaan
4. Denah Lokasi Pusbangtendik (Pusdiklat Pegawai)

REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2013

A. LATAR BELAKANG

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa "Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri". Sementara itu Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sejalan dengan itu dalam hal pendanaan pada pasal 46 ayat (1) ditegaskan bahwa "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat".

Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta memperhatikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Kementerian/Lembaga yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di masing-masing tingkatan pemerintahan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Rakor Teknis tersebut dalam bentuk Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK).

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diatur bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, serta menjadi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah otonom. Selain itu visi dan misi dalam Renstra Kemdikbud 2010—2014 juga telah mengakomodir semua urusan wajib dan urusan pilihan tersebut merupakan bentuk pelayanan dasar bagi masyarakat guna memenuhi dan meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian layanan pendidikan serta melestarikan dan memperkuat kebudayaan Indonesia.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai peraturan tersebut di atas, perlu dirumuskan dan disepakati kebijakan tahunan pembangunan pendidikan dan kebudayaan melalui Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan ini melibatkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi, Kabupaten dan Kota, Rektor PTN dan Kopertis, serta pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan lainnya. Selanjutnya hasil rumusan kebijakan RNPK tahun 2013 dijadikan acuan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk merencanakan dan melaksanakan program strategis yang menjadi prioritas nasional bidang pendidikan dan kebudayaan.

B. LANDASAN HUKUM

Kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai peraturan perundangan yang relevan, antara lain:

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Surat Keputusan Mendiknas No. 90 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal di Lingkungan Depdiknas;
9. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional;
10. Permendikbud Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. TEMA

Tema Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 adalah **“Menuntaskan Program Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013—2014”**. Penjelasan mengenai tema RNPk Tahun 2013 tersebut adalah merupakan berbagai upaya yang difokuskan untuk mengoptimalkan pencapaian *output* dan *outcome* dalam pelaksanaan program dan kegiatan melalui percepatan realisasi penyerapan APBN TA 2013, mewujudkan opini WTP dan penguatan pelaksanaan Zona Integritas pada seluruh satuan kerja pendidikan dan kebudayaan. Penuntasan program prioritas tersebut dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Visi yang tertuang dalam Renstra Kemdikbud Tahun 2010—2014, yaitu dengan penetapan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
2. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
4. Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
5. Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan
6. Mewujudkan Kelestarian dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Rebuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan ini dimaksudkan sebagai langkah dan tindakan konkret pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya, untuk menuntaskan program prioritas pendidikan dan kebudayaan tahun 2013—2014, serta menyiapkan rancangan kebijakan kedepan. Disamping itu RNPk ini juga bertujuan untuk: (1) melanjutkan reformasi birokrasi guna memantapkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian layanan pendidikan dan kebudayaan; (2) menjaga keberlanjutan keberhasilan pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (3) sinergitas sumber daya pendidikan dan kebudayaan dalam mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dan upaya perbaikan pada periode pembangunan selanjutnya.

Tujuan khusus Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 antara lain adalah:

1. Melakukan evaluasi capaian kinerja pembangunan pendidikan tahun 2012;
2. Sosialisasi dan pemantapan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2013 yang difokuskan pada upaya penuntasan program prioritas nasional melalui:
 - a) Peningkatan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan;
 - b) Perluasan keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan;

- c) Peningkatan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan dan kebudayaan;
 - d) Perwujudan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan;
 - e) Penjaminan kepastian memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan.
 - f) Perwujudan Kelestarian dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia
3. Melanjutkan Reformasi Birokrasi Kemdikbud menuju tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel;
 4. Tersusunnya Bahan Kebijakan Tahunan Kemdikbud 2014;
 5. Penyiapan bahan Musrenbangnas 2013.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 adalah:

1. Evaluasi pelaksanaan program dan capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2012, masing-masing unit utama, provinsi, kabupaten, dan kota, serta unit kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;
2. Kebijakan serta rancangan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2014 serta terbangunnya komitmen untuk menyukseskannya;
3. Rencana aksi dan komitmen pusat dan daerah dalam implementasi Kurikulum 2013 dan PMU;
4. Rencana aksi dan komitmen PTN dalam melaksanakan amanat UU 12/2012 (Akademi Komunitas dan BOPTN);
5. Rencana aksi pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
6. Rencana aksi penguatan tata kelola;
7. Tersedianya bahan masukan untuk Musrenbangnas 2013;
8. Lebih meningkatkan kinerja dan integritas seluruh satuan kerja pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah dalam mengatasi isu strategis serta tantangan pembangunan nasional.

Melalui Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 ini diharapkan seluruh jajaran pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah memiliki komitmen atas pencapaian target kinerja program prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemdikbud 2010—2014 dan Renstra di masing-masing SKPD serta berbagai kebijakan dan program prioritas nasional pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di masa yang akan datang.

F. PESERTA

NO	Pejabat/Instansi	Acara	
		Pembukaan	Penutupan
1	Wakil Presiden	1	---
2	Menkokesra	1	---
3	Pimpinan Komisi X DPR RI dan Ketua PAH III DPD RI	5	---
4	Kemendikbud Pusat (Menteri sampai Es-II)	75	74
5	Deputi IV Bid. Koordinasi Pend dan Agama, dan Deputi Meneg PPN/ Kepala Bappenas Bidang SDM dan Kebud, Kepala BPS, Deputi Kesra Setkab	4	---
6	Kepala Biro Perencanaan 18 Kementerian/Lembaga yg menyelenggarakan fungsi Pendidikan dan Direktur Pembinaan Anggaran II DJA, Kemenkeu	19	---
7	KPK, BPK, BPKP, Ombudsman, Kemenpan dan RB	5	---
8	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi	33	33
9	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota	506	506
10	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi dan TP	41	41
11	PTN, BPLPT, dan Kopertis	107	107
12	LPMP, LPPKS, dan P4TK	44	44
13	UPT Kebudayaan + LSF	42	42
14	Balai Bahasa dan Balai Pengembangan Media	33	33
15	Dewan Pendidikan Tinggi	4	4
16	P2PNFI dan BPPNFI	8	8
17	BSNP dan BAN	5	5
18	SEAMEO centers	6	6
19	Atase Pendidikan, Dubes RI Untuk UNESCO, dan Ketua Harian KNIU	17	17
20	Narasumber Kurikulum	10	10
21	PB PGRI, IGI, APTISI, DPP HIPKI dan DPP HISPMI	7	6
22	Kabagren Unit Utama, Kabag pada Biro PKLN dan Biro Umum	17	17
23	KEMENAG	6	6
	Jumlah	996	959

G. SUBSTANSI DAN BAHAN

Substansi dan bahan pokok yang disiapkan untuk penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 antara lain terdiri atas:

1. **Bahan yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**
 - a. Panduan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013;
 - b. Paparan Ketua Komisi sesuai dengan Topik Sidang Komisi I s.d V;
 - c. Bahan untuk sidang komisi I s.d V berupa hardcopy dan softcopy;
 - d. Form-Pilihan Komisi menjadi Anggota Sidang Komisi Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2013;
 - e. Form-Verifikasi Alokasi dan Realisasi Anggaran DAU Fungsi Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 dan alokasi Tahun 2013;
 - f. Data nama sekolah dan guru per kabupaten dan kota yang akan mengikuti *pilot project* pelaksanaan kurikulum 2013;
 - g. Form-Laporan Rencana dan Realisasi pelaksanaan DAK Tahun 2012;
 - h. Form-Sinkronisasi dan Koordinasi Data Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
 - i. Form-isian untuk menjaring usulan/saran/pendapat dari peserta sidang komisi;
 - j. Form-rancangan laporan hasil sidang komisi I s.d V;
 - k. Rambu-rambu pelaksanaan sidang komisi I s.d V;
 - l. Instrumen survei kepuasan peserta terhadap pelayanan pelaksanaan RNPk 2013.

2. **Bahan yang disiapkan oleh Peserta Daerah**
 - a. Form-Pilihan Komisi menjadi Anggota Sidang Komisi Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2013 yang telah diisi;
 - b. Hasil Verifikasi data/informasi yang mencakup:
 - 1) Alokasi dan Realisasi Anggaran DAU Fungsi Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 dan alokasi Tahun 2013;
 - 2) Laporan Rencana dan Realisasi pelaksanaan DAK Tahun 2012;
 - 3) Sinkronisasi dan Koordinasi Data Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
 - 4) Data nama sekolah dan guru per kabupaten dan kota yang akan mengikuti *pilot project* pelaksanaan kurikulum 2013;
 - c. Laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012;
 - d. Rencana program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Tahun 2014.

H. PERSIDANGAN

1. Pertemuan Informal Sarasehan:

Acara sarasehan ini diawali dengan tindak lanjut keputusan MK tentang RSBI/SBI yang dipandu oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) oleh Kepala Balitbang.

2. Sidang Pleno I:

Acara Sidang Pleno I diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Laporan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku penanggung jawab RNPk 2013, dilanjutkan dengan arahan dan pembukaan oleh Wakil Presiden RI sekaligus pencahangan pelaksanaan kurikulum 2013. Kemudian acara dilanjutkan dengan paparan Mendikbud dan penandatanganan kontrak kinerja antara Mendikbud dengan Pejabat Eselon I dan antara Pejabat Eselon I dengan Kepala UPT pusat di daerah.

3. Sidang Pleno II:

Acara Sidang Pleno II diawali dengan paparan narasumber dari luar lingkungan Kemdikbud, yaitu:

- a. Pembicara Tamu 1, diharapkan menyampaikan materi tentang Peningkatan Budaya Kerja;
- b. Pembicara Tamu 2, Walikota Surabaya menyampaikan materi tentang Implementasi Pendidikan Menengah Universal (PMU);
- c. Pembicara Tamu 3, diharapkan menyampaikan materi tentang Program Pembangunan Bidang Pendidikan di Kalimantan Timur.

4. Sidang Komisi Sesi I dan II

Sidang Komisi, membahas secara lebih mendalam tentang isu-isu pokok pendidikan dan kebudayaan yaitu:

Komisi	TOPIK BAHASAN	PIC*
I	PERSIAPAN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN KURIKULUM 2013	Koordinator: Wamendik
	Subkomisi IA: Penyiapan Guru (Pelatih Nasional, Guru Inti, dan Guru Kelas/mapel) dan mekanisme Pendampingan serta Monev	
	Subkomisi IB: Penyiapan Buku (Penulisan-pencetakan-distribusi buku guru dan buku siswa	
II	MELAKSANAKAN AMANAT UU 12/2012 (AKADEMI KOMUNITAS DAN BOPTN)	Dirjen Dikti
III	MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER BANGSA DAN DIPLOMASI BUDAYA	Pt. Dirjen Kebudayaan
IV	TATAKELOLA SUMBERDAYA PEMBANGUNAN DIKBUD:	Koordinator: Sesjen
	1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan	Irjen
	2. RBI dan Pengelolaan Kepegawaian serta Pengelolaan Asset dan PBJ	Karo Umum
	3. Tindak Lanjut RSBI/SBI pasca Putusan MK	Karo Hukor
	4. Pengelolaan Dana Dekon, DAK, dan BOS	Sesjen
V	IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU)	Dirjen Dikmen

Pemilihan materi tersebut dimaksudkan untuk mendalami substansi yang pembahasannya tanpa menitikberatkan pada jenjang pendidikan tertentu dan tanpa memfokuskan pada struktur birokrasi Eselon I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Sidang Komisi Sesi III dan Sesi IV

Sidang komisi dilanjutkan dengan perumusan hasil diskusi dari masing-masing komisi I s.d V. Perumusan hasil sidang komisi dilakukan oleh Tim Perumus sidang komisi yang bersangkutan dibantu oleh tim substansi RNPk 2013, selanjutnya akan dilaporkan pada Sidang Pleno III.

6. Sidang Pleno III:

- a. Acara diawali dengan laporan hasil sidang komisi I s.d V yang disampaikan oleh Ketua Komisi/Sekretaris Komisi atau yang ditunjuk. Laporan ini merupakan kristalisasi hasil sidang komisi yang dijadikan bahan kebijakan tahunan 2013 dan kebijakan perencanaan Kemdikbud tahun 2014. Diharapkan hasil sidang komisi tersebut akan digunakan sebagai acuan dan pedoman penyusunan program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;

- b. Acara penutupan RNPK 2013 diselenggarakan di Pusbangtendik, yang tahapannya sebagai berikut:
- 1) Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
 - 2) Penutupan acara RNPK 2013 oleh Mendikbud dan diakhiri dengan Konferensi Pers yang dihadiri oleh Mendikbud dan didampingi Wamendik dan Wamenbud serta Para Eselon I.

I. PEMBAGIAN DAN PENGORGANISASIAN KOMISI

Pembagian dan pengorganisasian komisi dimaksudkan untuk mengefektifkan pelaksanaan sidang komisi. Komisi akan dibagi menjadi 5 (lima) komisi, adapun untuk komisi I yang membahas tentang Persiapan Pelaksanaan Kurikulum 2013 dikelompokkan menjadi 2 (dua) subkomisi. Hal ini dimaksudkan untuk mendalami substansi dan permasalahan serta solusi tindak lanjut yang akan disepakati pada komisi I. Penjelasan tentang Ketua Komisi, Sekretaris, Koordinator Perumus dan Anggota Tim Perumus adalah sebagai berikut:

Komisi I	: Persiapan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kurikulum 2013
Ketua Komisi	: Wamen Bidang Pendidikan
Sekretaris	: (dipilih dari peserta)
Koordinator Perumus	: 1. Kepala BPSDMK dan PMP (Sub Komisi Guru) 2. Dirjen Pendidikan Dasar (Sub Komisi Buku)

Anggota Tim Perumus Subkomisi IA (Guru):

1. Direktur Jenderal PAUDNI;
2. Staf Ahli Menteri Bidang Organisasi dan Manajemen;
3. Sekretaris Badan PSDMPK dan PMP;
4. Direktur Pembinaan SMA, Ditjen Dikmen;
5. Direktur Pembinaan PTK Pendidikan Dasar, Ditjen Dikdas;
6. Direktur Pembinaan PTK Pendidikan Menengah, Ditjen Dikmen;
7. Direktur Pembinaan PTK PAUDNI, Ditjen PAUDNI;
8. Kepala Pusat Pengembangan Tendik, Badan PSDMPK dan PMP;
9. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan PSDMPK dan PMP;
10. Kepala Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan;
11. Inspektur IV (Bidang Dikmen) Itjen.

Anggota Tim Perumus Subkomisi IB (Buku):

1. Kepala Badan Litbang Kemdikbud;
2. Kepala Badan PP Bahasa;
3. Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang;

4. Sekretaris Ditjen Dikdas;
5. Sekretaris Balitbang;
6. Sekretaris Ditjen PAUDNI;
7. Direktur Pembinaan SD, Ditjen Dikdas;
8. Direktur Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas;
9. Direktur Pembinaan SMK, Ditjen Dikmen
10. Direktur Pembinaan PK dan LK Pendidikan Dasar, Ditjen Dikdas;
11. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen PAUDNI;
12. Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Badan PSDMPK dan PMP;
13. Inspektur II (Bidang Dikdas), Itjen.

Komisi II : **Melaksanakan Amanat UU No. 12/2012
(Akademi Komunitas dan BOPTN)**

Ketua Komisi : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Sekretaris : (dipilih dari peserta)

Koordinator Perumus : Sekretaris Ditjen Dikti

Anggota Tim Perumus :

1. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum;
2. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama, Ditjen Dikti;
3. Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti;
4. Direktur PTK Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti;
5. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti;
6. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang;
7. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang;
8. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Badan PP Bahasa;
9. Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi
10. Inspektur III (Bidang Dikti), Itjen.

Komisi III : **Melestarikan dan Memperkukuh Kebudayaan
Indonesia**

Ketua Komisi : Wakil Menteri Bidang Kebudayaan

Sekretaris : (dipilih dari peserta)

Koordinator Perumus : Plt. Dirjen Kebudayaan

Anggota Tim Perumus :

1. Staf Ahli Menteri Bidang Kebudayaan
2. Sekretaris Ditjen Kebudayaan;
3. Sekretaris Badan PP Bahasa;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Balitbang
5. Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan, Badan PP Bahasa;
6. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseum, Ditjen Kebudayaan;
7. Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman, Ditjen Kebudayaan;
8. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya, Ditjen Kebudayaan;

9. Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, Ditjen Kebudayaan;
10. Direktur Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Ditjenbud;
11. Kepala Museum Nasional, Ditjen Kebudayaan;
12. Kepala Galeri Nasional, Setjen;
13. Kepala Lembaga Sensor Film, Setjen;
14. Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Setjen;
15. Inspektur I (Bidang PAUDNI, Kebudayaan, dan Bahasa), Itjen.

**Komisi IV : Penguatan Tata Kelola Sumber Daya
Pembangunan Dikbud**

Ketua Komisi : Sekretaris Jenderal Kemdikbud

Sekretaris : (dipilih dari peserta)

Koordinator Perumus : Kepala Biro Kepegawaian

Anggota Tim Perumus :

1. Inspektur Jenderal, Kemdikbud;
2. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
5. Kepala Biro Umum, Setjen;
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen;
7. Kepala Biro Keuangan, Setjen;
8. Kepala Pusat Informasi dan Humas;
9. Tim RPP, Balitbang.

**Komisi V : Implementasi Pendidikan Menengah
Universal (PMU)**

Ketua Komisi : Direktur Jenderal Pendidikan Menengah

Sekretaris : (dipilih dari peserta)

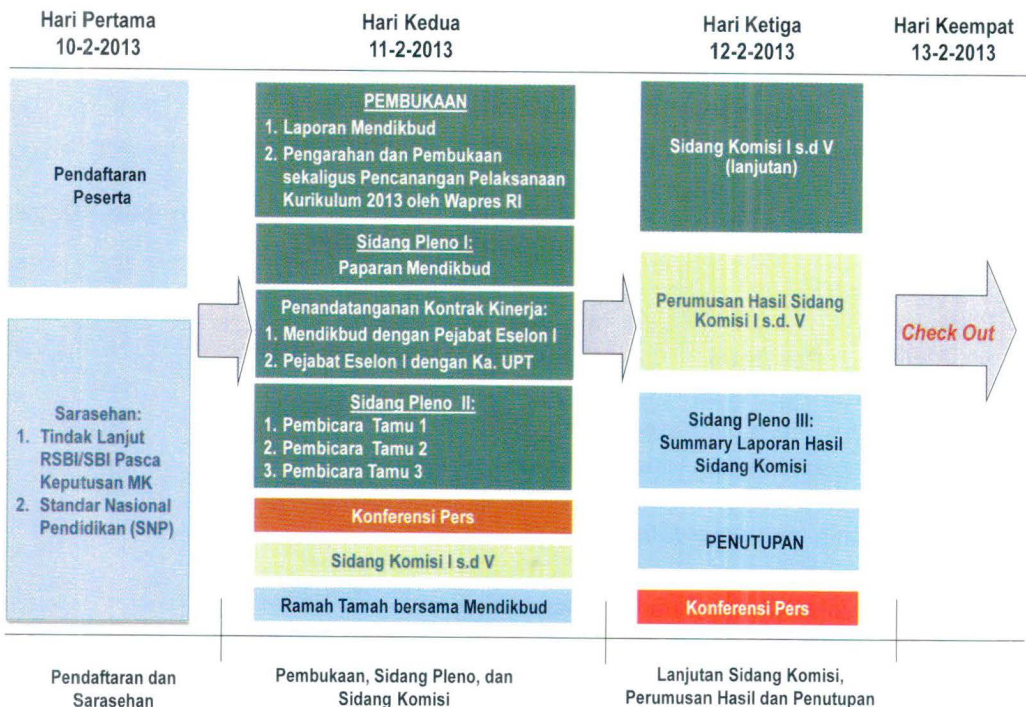
Koordinator Perumus : Sekretaris Ditjen Dikmen

Anggota Tim Perumus :

1. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan;
2. Staf Khusus Menteri Bidang Sistem Evaluasi dan PMP;
3. Direktur Pembinaan PK dan LK Pendidikan Menengah, Ditjen Dikmen;
4. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Setjen;
5. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Setjen;
6. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI;
7. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI;
8. Inspektur Investigasi, Itjen.

Daftar nama ketua komisi, koordinator, tim perumus dan anggota dalam Sidang Komisi I sampai dengan V secara terinci, tertera dalam lampiran.

J. SKENARIO PELAKSANAAN RNPK 2013



K. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 ini, secara lebih rinci diatur sebagai berikut:

1. Hari Minggu, 10 Februari 2013

Kegiatan diawali dengan pendaftaran peserta dan penyerahan dokumen Rembuknas sesuai dengan permintaan data/informasi yang tertera dalam undangan dan dilanjutkan dengan sarasehan yang diawali dengan tindak lanjut keputusan MK tentang RSBI/SBI dan dipandu oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) oleh Kepala Balitbang.

2. Hari Senin, 11 Februari 2013

- a. Acara sidang pleno I dimulai dengan pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 yang mencakup kegiatan:
 - 1) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dengan Dirijen Tesa atau Gultom;
 - 2) Laporan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2013 yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

- 3) Arahan Wakil Presiden RI dan Pembukaan Rembuknas sekaligus Pencanangan Pelaksanaan Kurikulum 2013;
 - 4) Paparan Mendikbud tentang strategi pelaksanaan kurikulum 2013
 - 5) Penandatanganan Kontrak Kinerja antara :
 - a) Mendikbud dengan Pejabat Eselon I;
 - b) Pejabat Eselon I dengan Kepala UPT Pusat di daerah;
- b. Acara Sidang Pleno II dimulai dengan paparan narasumber dari luar lingkungan Kemdikbud yaitu:
- 1) Pembicara Tamu 1, diharapkan akan menyampaikan materi tentang penguatan budaya kerja;
 - 2) Pembicara Tamu 2, Walikota Surabaya yang akan menyampaikan materi tentang pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU);
 - 3) Pembicara Tamu 3, diharapkan akan menyampaikan materi tentang Program Pembangunan Bidang Pendidikan di Kalimantan Timur.
- c. Acara dilanjutkan dengan Konferensi Pers oleh Mendikbud didampingi Wakil Menteri Bidang Pendidikan dan Wakil Menteri Bidang Kebudayaan serta seluruh Eselon I di lingkungan Kemdikbud;
- d. Setelah Sidang Pleno selesai, acara dilanjutkan dengan Sidang Komisi I sampai dengan Komisi V yang membahas isu-isu strategis serta solusi pemecahannya dengan rambu-rambu diskusi sebagai berikut:
- 1) Diskusi Sidang Komisi diawali dengan paparan oleh masing-masing Ketua Komisi;
 - 2) Ketua Komisi mengkoordinasikan pemilihan Sekretaris Komisi yang diharapkan berasal dari peserta daerah;
 - 3) Ketua Komisi memimpin sidang, mengarahkan, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sidang komisi;
 - 4) Ketua Komisi mengendalikan jalannya sidang komisi berdasarkan bahan sidang komisi yang telah disiapkan oleh Tim Substansi RNPk 2013;
 - 5) Sidang Komisi membahas masalah, isu-isu strategis dan seluruh peserta diharapkan berperan aktif serta menyampaikan saran/pendapat/usulan/solusi dan bahan rekomendasi kebijakan;
 - 6) Bagi peserta yang belum mendapat kesempatan memberikan usulan/saran/pendapat yang terkait dengan substansi bahasan di setiap komisi, dapat menuliskannya dalam form isian yang disediakan oleh panitia;
 - 7) Koordinator Perumus dibantu oleh Anggota Tim Perumus dan petugas substansi menghimpun/merekam proses sidang komisi dan merumuskan hasil sidang komisi;
 - 8) Tim Perumus dimungkinkan untuk ditambah dari peserta daerah yang ditunjuk oleh Ketua Komisi maupun Koordinator Perumus;

- 9) Perumusan hasil sidang komisi di pimpin oleh Koordinator Perumus dan harus selesai paling lambat pukul 15.00 WIB hari Selasa, 12 Februari 2013;
- 10) Petugas substansi membantu menyiapkan bahan-bahan diskusi yang diperoleh dari penanggungjawab materi diskusi (unit utama) untuk dibagikan kepada semua anggota komisi dan secara aktif membantu kelancaran proses diskusi sampai dengan perumusan hasil sidang komisi;
- 11) Koordinator Perumus dibantu Sekretaris dan bersama-sama dengan Anggota Tim Perumus substansi mempersiapkan paparan hasil rumusan sidang komisi;
- 12) Masing-masing Ketua Komisi atau yang ditunjuk mewakili komisi melaporkan hasil rumusan sidang komisi kepada Mendikbud pada waktu acara penutupan RNPk 2013.

3. Hari Selasa, 12 Februari 2013

- a. Pada hari ketiga acara dilanjutkan dengan:
 - 1) Melanjutkan sidang komisi sesi III;
 - 2) Perumusan hasil sidang komisi;

- b. Setelah sidang komisi selesai, acara dilanjutkan dengan sidang pleno III dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Laporan hasil sidang komisi I s.d V yang disampaikan oleh Ketua Komisi atau yang ditunjuk mewakili komisi.
 - 2) Acara dilanjutkan penutupan RNPk 2013 dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a) Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Sambutan sekaligus penutupan acara RNPk 2013 oleh Mendikbud;
 - c) Acara penutupan diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh petugas yang ditunjuk;

- c. Sebagai akuntabilitas pelaksanaan Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, Mendikbud berkenan memberikan Konferensi Pers yang didampingi oleh Wamendik dan Wamenbud serta Para Eselon I. Informasi yang akan disampaikan antara lain berkaitan dengan isu-isu strategis, permasalahan, strategi peningkatan kinerja (solusi) serta rencana implementasi sebagai kristalisasi hasil sidang komisi I s.d V.

L. PENYELENGGARAAN

1. Kepanitiaan

Pelindung	:	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Pengarah	:	Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan, Wakil Mendikbud Bidang Kebudayaan, Dirjen PAUDNI, Dirjen Dikdas, Dirjen Dikmen, Dirjen Dikti, Dirjen Kebudayaan, Inspektur Jenderal, Kepala Balitbang, Kepala Badan PSDMPK dan PMP, serta Kepala Badan PP Bahasa.
Ketua Umum	:	Sekretaris Jenderal
Ketua Seksi Substansi	:	Kepala Biro Perencanaan dan KLN
Ketua Seksi	:	Kepala Biro Umum
Penyelenggara	:	

2. Waktu dan Tempat

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 ini dilaksanakan tanggal 10 s.d 13 Februari 2013. Kegiatan diselenggarakan di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (Pusbangtendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Raya Cinangka Km 19, Bojongsari, Sawangan Depok, sedangkan untuk akomodasi diatur sebagai berikut:

- Wisma Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan
- Wisma P4TK Bisnis dan Pariwisata (PPPG Kejuruan)
- Wisma P4TK Penjas dan Bimbingan Konseling (BK)
- Wisma Universitas Terbuka
- Wisma Zaitun (Multimakmur)

Selanjutnya tentang penempatan akomodasi peserta akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Penyelenggara.

3. Jadwal

Kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 diselenggarakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 10 s.d 13 Februari 2013. Jadwal selengkapnya sebagaimana tertera pada lampiran.

4. Pembiayaan

Biaya yang berkaitan dengan penyiapan bahan substansi dan penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 ini, dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013.

M. INFORMASI LAIN

1. Peserta RNPk 2013 dimohon mengikuti seluruh acara sesuai jadwal dan hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai;
2. Bahan penyajian dan bahan sidang komisi yang disampaikan kepada peserta akan dikemas dalam bentuk *Compact Disk* (CD);
3. Peserta dapat memperoleh berbagai informasi yang terkait dengan substansi, materi sidang komisi, dan lain-lain di ruang sekretariat substansi;
4. PIH menyediakan Gerai Publikasi Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran bahan atau buku dan dibuka pada saat istirahat (rehat dan isihoma);
5. Materi sidang bisa diunduh pada **Laman: www.kemdikbud.go.id**;
6. Pakaian:
 - a. Selama Pelaksanaan Rembuk: mengenakan pakaian batik lengan panjang dan ID Card;
 - b. Pada acara malam ramah tamah dengan Mendikbud, peserta dimohon mengenakan pakaian batik. Acara tersebut akan diisi dengan hiburan kesenian;
 - c. Senam pagi dengan mengenakan pakaian olahraga.
7. Peserta Rembuk dimohon tidak meninggalkan materi RNPk 2013 (buku, CD, bulletin, hardcopy pembicara tamu, dan lain-lain), baik di kamar maupun di ruang sidang;
8. Selama pelaksanaan RNPk 2013 kepada seluruh peserta diharapkan menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan;
9. Selama pelaksanaan RNPk 2013 kepada seluruh peserta dilarang berbuat asusila, membawa dan/atau menggunakan senjata api/tajam, minuman keras, dan narkoba serta obat-obatan terlarang lainnya;
10. Panitia tidak bertanggungjawab atas seluruh kerusakan/kehilangan barang atau dokumen penting peserta RNPk 2013;
11. Panitia menyediakan bus antar jemput pergi pulang (pp) dari tempat penginapan ke tempat penyelenggaraan RNPk 2013;
12. Panitia menyediakan dokter dan klinik kesehatan serta pusat refleksi di Gedung Budaya;
13. Panitia hanya menyediakan fasilitas akomodasi dan konsumsi sesuai dengan jumlah undangan;
14. Ruang Substansi dan Sekretariat Penyelenggara RNPk 2013 terletak di Gedung Budaya;
15. Ruang makan peserta di Gedung Paramitha;
16. Call Center Penyelenggaraan RNPk 2013 (021) 5737940.



**LAMPIRAN
BUKU PANDUAN RNP
TAHUN 2013**

JADWAL REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2013

Waktu	Acara	Pembicara	Pemandu Sidang	Tempat
Minggu 10 Februari 2013				
12.00 - 19.00	Pendaftaran Peserta			Lobi Gedung Merah Putih
13.30 - 17.00	Pertemuan Informal: sarasehan tindaklanjut pasca Keputusan MK tentang RSBI/SBI	Dirjen Dikdas dan Dirjen Dikmen	Sesditjen Dikmen	Gedung Merah Putih
17.00 - 19.00	Ishoma			
19.00 - 21.00	Makan Malam			Gedung Paramitha
Senin 11 Februari 2013				
05.30 - 06.00	Senam Pagi			Lap. Gedung Pancasila
06.00 - 07.30	Makan Pagi			Gedung Paramitha
07.30 - 08.15	Persiapan			Gedung Garuda
	Sidang Pleno I:			
08.15 - 08.30	Peserta siap ditempat acara (ruang sidang): Pakaian Batik			
08.30 - 08.50	- Wapres tiba di Gedung Garuda Pusbangtendik di sambut oleh Mendikbud, Gubernur Jawa Barat (tentatif), Walikota Depok, dan Ketua Panitia, selanjutnya menuju ruang tunggu utama - Tiba di ruang tunggu utama		MC (Deta dan Laras)	Gedung Garuda
08.50 - 08.55	Wapres menuju tempat acara			
08.55 - 09.00	Wapres tiba di tempat acara			
09.00 - 09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya		Dirijen (Tesa/Gultom)	
09.10 - 09.20	Laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Mendikbud		
09.20 - 09.45	Arahan Wakil Presiden RI dan Pembukaan Rembuknas sekaligus Penganangan Pelaksanaan Kurikulum 2013	Wapres RI		
09.45 - 09.50	Doa			
09.50 - 10.00	Wakil Presiden RI meninggalkan tempat acara		MC (Deta dan Laras)	
10.00 - 11.00	Paparan Mendikbud	Mendikbud		
11.00 - 11.15	Penandatanganan Kontrak Kinerja: - Mendikbud dengan Pejabat Eselon I - Pejabat Eselon I dengan Kepala UPT	Mendikbud, Pejabat Eselon I dan UPT		

Waktu	Acara	Pembicara	Pemandu Sidang	Tempat
	Sidang Pleno II:			
11.15 - 12.15	Budaya Kerja	Pembicara Tamu 1		
	Pendidikan Menengah Universal (PMU)	Pembicara Tamu 2		
12.15 - 12.30	Rehat dan Konferensi Pers	Mendikbud didampingi Eselon I		
12.30 - 13.30	Ishoma			Gedung Pancasila
	Sidang Komisi			
13.30 - 15.30	Sesi I	Ketua Komisi I s.d V	Ketua Komisi I s.d V	Ruang Kelompok
15.30 - 15.45	Rehat			
15.45 - 18.00	Sesi II	Ketua Komisi I s.d V	Ketua Komisi I s.d V	Ruang Kelompok
18.00 - 19.30	Ishoma			
19.30 - 22.00	Ramah Tamah bersama Mendikbud			Gedung Garuda
Selasa 12 Februari 2013				
05.30 - 06.30	Senam Pagi			Lap. Gedung Pancasila
06.30 - 08.30	Makan Pagi			Gedung Paramitha
	Sidang Komisi Lanjutan	Ketua Komisi I s.d V	Ketua Komisi I s.d V	Ruang Kelompok
08.30 - 12.00	Sesi III			
12.00 - 15.00	Ishoma dan Perumusan Hasil Sidang Komisi	Ketua Komisi I s.d V	Ketua Komisi I s.d V	Ruang Kelompok
	Sidang Pleno III:			
15.00 - 16.30	Laporan Hasil Sidang Komisi I s.d V	Ketua Komisi I s.d V	Mendikbud, Wamendik, Wamenbud, dan Sesjen	Gedung Garuda
16.30 - 17.00	Penutupan : (Pakaian Batik)		MC (Deta dan Laras)	
	1. Laporan Ketua Panitia Rembuknas Dikbud	Sesjen		
	2. Sambutan sekaligus Penutupan	Mendikbud		
	3. Doa	Peserta		
17.00 - 17.30	Konferensi Pers	Mendikbud	Kepala PIH	Gedung Pancasila
Rabu 13 Februari 2013				
06.30 - 08.30	Makan Pagi			Gedung Paramitha
08.30 - 12.00	Check Out			

Ket: Jadwal Tentatif (sewaktu-waktu dapat berubah)

REKAPITULASI PESERTA REMBUKNAS 2013

NO	PEJABAT	JUMLAH	KOMISI I		KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV	KOMISI V	JUMLAH
			SUBKOMISI IA	SUBKOMISI IB					
			AULA 1 PANCASILA LT. 2	AULA 2 PANCASILA LT. 2					
	RUANG SIDANG		IA	IB	II	III	IV	V	
1	Wamen	2	-	-	-	1	-	-	1
2	Staf Ahli/khusus Menteri	8	1	-	2	1	1	2	7
3	Eselon I	10	4	1	1	1	2	1	10
4	Eselon II	54	9	11	9	11	7	7	54
5	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi	33	7	4	-	-	18	4	33
6	Kepala Dinas Pendidikan Kab/kota	506	149	146	53	2	13	143	506
7	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi	33	-	-	-	33	-	-	33
8	TP Kebudayaan	8	-	-	-	8	-	-	8
9	Universitas/Sekolah Tinggi	61	15	5	25	7	7	2	61
10	Politeknik	33	-	2	23	-	8	-	33
11	BPLPT	1	-	-	-	-	1	-	1
12	Kopertis	12	-	4	2	-	5	1	12
13	LPMP	31	14	10	-	-	3	4	31
14	LPPKS	1	-	1	-	-	-	-	1
15	P4TK	12	12	-	-	-	-	-	12
16	P2PNFI	8	1	3	-	-	1	3	8
17	UPT Kebudayaan	41	-	-	-	42	-	-	42
18	LSF (Lembaga Sensor Film)	1	-	-	-	1	-	-	1
19	Balai Bahasa	30	3	1	-	26	-	-	30
20	Balai Pengembangan Media	3	-	2	-	1	-	-	3
21	Dewan Pendidikan Tinggi	4	-	-	4	-	-	-	4
22	BSNP	2	1	1	-	-	-	-	2
23	BAN (SM, PNF, PT)	3	1	1	1	-	-	-	3
24	SEAMEO	6	2	2	-	-	-	2	6
25	Atase Pendidikan	15	1	6	-	6	-	2	15
26	Dubes RI untuk Unesco	1	1	-	-	-	-	-	1

NO	PEJABAT	JUMLAH	KOMISI I		KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV	KOMISI V	JUMLAH
			SUBKOMISI IA	SUBKOMISI IB					
			AULA 1 PANCASILA LT. 2	AULA 2 PANCASILA LT. 2					
	RUANG SIDANG		IA	IB	II	III	IV	V	
27	Ketua Harian KNIU	1	1	-	-	-	-	-	1
28	PB PGRI	2	2	-	-	-	-	-	2
29	Ikatan Guru Indonesia (IGI)	2	-	2	-	-	-	-	2
30	APTIS	2	-	-	-	-	2	-	2
31	DPP HIPKI	1	-	-	-	-	-	1	1
32	DPP HISPPPI	1	-	-	-	-	-	1	1
33	Narasumber Kurikulum	10	5	5	-	-	-	-	10
34	KEMENAG	6	2	2	-	-	-	2	6
35	Kabagren Unit Utama, Kabag di Biro PKLN dan Kabag di Biro Umum	17	3	3	1	1	3	-	11
	Jumlah Peserta	961	234	212	121	141	71	175	954
33	Jumlah Petugas Substansi		8	8	8	8	7	8	47
	Jumlah Keseluruhan	961	242	222	129	149	78	183	1001
	Kapasitas Ruang sidang		260	240	130	150	80	250	1350

**DAFTAR PESERTA KOMISI I
PERSIAPAN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN KURIKULUM 2013
SUBKOMISI I-A (PENYIAPAN GURU)**

TEMPAT : AULA 1 PANCASILA LT. 2

NO	PEJABAT	TUGAS
1	Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan	Ketua Komisi
2	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Koordinator Perumus
3	Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	Anggota Tim Perumus
4	Staf Ahli Menteri Bidang Organisasi dan Manajemen	Anggota Tim Perumus
5	Sekretaris Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan	Anggota Tim Perumus
6	Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Anggota Tim Perumus
7	Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	Anggota Tim Perumus
8	Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah	Anggota Tim Perumus
9	Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	Anggota Tim Perumus
10	Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan	Anggota Tim Perumus
11	Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik	Anggota Tim Perumus
12	Kepala Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan	Anggota Tim Perumus
13	Inspektur IV	Anggota Tim Perumus
14	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Anggota
15	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu	Anggota
16	Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Lampung	Anggota
17	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi D.I. Yogyakarta	Anggota
18	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali	Anggota
19	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Prov. NTB	Anggota
20	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat	Anggota
21	Rektor Universitas Tanjung Pura	Anggota
22	Rektor Universitas Negeri Medan	Anggota
23	Rektor Universitas Negeri Padang	Anggota
24	Rektor Universitas Negeri Jakarta	Anggota
25	Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (BHMN)	Anggota
26	Rektor Universitas Negeri Yogyakarta	Anggota
27	Rektor Universitas Negeri Semarang	Anggota
28	Rektor Universitas Negeri Surabaya	Anggota
29	Rektor Universitas Negeri Malang	Anggota
30	Rektor Universitas Negeri Makassar	Anggota
31	Rektor Universitas Negeri Manado	Anggota
32	Rektor Universitas Negeri Gorontalo	Anggota
33	Rektor Universitas Negeri Papua	Anggota
34	Rektor Universitas Malikussaleh Banda Aceh	Anggota
35	Rektor Universitas Pendidikan Ganesha	Anggota
36	Kepala P4TK Bidang Bangunan dan Listrik Medan	Anggota
37	Kepala P4TK Kejuruan Bidang Bisnis dan Pariwisata Jakarta	Anggota
38	Kepala P4TK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling Jakarta	Anggota
39	Kepala P4TK Bahasa Jakarta	Anggota
40	Kepala P4TK IPA Bandung	Anggota
41	Kepala P4TK Bidang Otomotif dan Elektronika Malang	Anggota
42	Kepala P4TK Pendidikan TK Bandung	Anggota

NO	PEJABAT	TUGAS
43	Kepala P4TK Pendidikan dan Pertanian Cianjur	Anggota
44	Kepala P4TK Matematika Yogyakarta	Anggota
45	Kepala P4TK Kesenian (Seni dan Budaya) Yogyakarta	Anggota
46	Kepala P4TK Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS Malang	Anggota
47	Kepala P4TK Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung	Anggota
48	Kepala LPMP Nangroe Aceh Darussalam	Anggota
49	Kepala LPMP Sumatra Utara	Anggota
50	Kepala LPMP Sumatra Barat	Anggota
51	Kepala LPMP Jambi	Anggota
52	Kepala LPMP D.I. Yogyakarta	Anggota
53	Kepala LPMP Jawa Timur	Anggota
54	Kepala LPMP Kalimantan Barat	Anggota
55	Kepala LPMP Kalimantan Timur	Anggota
56	Kepala LPMP Sulawesi Tenggara	Anggota
57	Kepala LPMP Bali	Anggota
58	Kepala LPMP Nusa Tenggara Barat	Anggota
59	Kepala LPMP Papua	Anggota
60	Kepala LPMP Banten	Anggota
61	Kepala LPMP Maluku Utara	Anggota
62	Kepala BP-PNFI-Regional VII Mataram-NTB	Anggota
63	Kepala Balai Bahasa Surabaya	Anggota
64	Kepala Balai Bahasa Padang	Anggota
65	Kepala Balai Bahasa Samarinda	Anggota
66	Duta Besar/Wakil RI untuk UNESCO	Anggota
67	Ketua Harian KNIU	Anggota
68	Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Den Haag	Anggota
69	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh	Anggota
70	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie	Anggota
71	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah	Anggota
72	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat	Anggota
73	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan	Anggota
74	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
75	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue	Anggota
76	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai	Anggota
77	Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan	Anggota
78	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang	Anggota
79	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat	Anggota
80	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah	Anggota
81	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal	Anggota
82	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir	Anggota
83	Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Padang Lawas	Anggota
84	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara	Anggota
85	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Anggota
86	Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	Anggota
87	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung	Anggota
88	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar	Anggota
89	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat	Anggota
90	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari	Anggota
91	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi	Anggota
92	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Anggota
93	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo	Anggota
94	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi	Anggota

NO	PEJABAT	TUGAS
95	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak	Anggota
96	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
97	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir	Anggota
98	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang	Anggota
99	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu	Anggota
100	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan	Anggota
101	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma	Anggota
102	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang	Anggota
103	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan	Anggota
104	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat	Anggota
105	Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro	Anggota
106	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
107	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Lampung Timur	Anggota
108	Kepala Dinas Dikbud, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran	Anggota
109	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara	Anggota
110	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus	Anggota
111	Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang	Anggota
112	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam	Anggota
113	Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau	Anggota
114	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin	Anggota
115	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir	Anggota
116	Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Jakarta Barat	Anggota
117	Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Jakarta Timur	Anggota
118	Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat	Anggota
119	Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon	Anggota
120	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang	Anggota
121	Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang	Anggota
122	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan	Anggota
123	Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi	Anggota
124	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur	Anggota
125	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang	Anggota
126	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan	Anggota
127	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	Anggota
128	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	Anggota
129	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
130	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang	Anggota
131	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal	Anggota
132	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak	Anggota
133	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati	Anggota
134	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang	Anggota
135	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes	Anggota
136	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap	Anggota
137	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali	Anggota
138	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
139	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo	Anggota
140	Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri	Anggota
141	Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar	Anggota
142	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
143	Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Anggota
144	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan	Anggota
145	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo	Anggota
146	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan	Anggota

NO	PEJABAT	TUGAS
147	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang	Anggota
148	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo	Anggota
149	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan	Anggota
150	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	Anggota
151	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo	Anggota
152	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso	Anggota
153	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	Anggota
154	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek	Anggota
155	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang	Anggota
156	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan	Anggota
157	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban	Anggota
158	Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul	Anggota
159	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
160	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas	Anggota
161	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak	Anggota
162	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya	Anggota
163	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Hulu Sungai Utara	Anggota
164	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
165	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara	Anggota
166	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
167	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Kasongan	Anggota
168	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau	Anggota
169	Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda	Anggota
170	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang	Anggota
171	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau	Anggota
172	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung	Anggota
173	Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar	Anggota
174	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan	Anggota
175	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng	Anggota
176	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli	Anggota
177	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bima	Anggota
178	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur	Anggota
179	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima	Anggota
180	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat	Anggota
181	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote-Ndao	Anggota
182	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota
183	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
184	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara	Anggota
185	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondauw Utara	Anggota
186	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondauw	Anggota
187	Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo	Anggota
188	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone	Anggota
189	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu	Anggota
190	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Selayar	Anggota
191	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba	Anggota
192	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang	Anggota
193	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur	Anggota
194	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buol	Anggota
195	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
196	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Mamuju Utara	Anggota
197	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene	Anggota
198	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton	Anggota

NO	PEJABAT	TUGAS
199	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo	Anggota
200	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara	Anggota
201	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru	Anggota
202	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur	Anggota
203	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan	Anggota
204	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
205	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan	Anggota
206	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika	Anggota
207	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire	Anggota
208	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Waropen	Anggota
209	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi	Anggota
210	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nduga	Anggota
211	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
212	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Memberamo Tengah	Anggota
213	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak	Anggota
214	Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong	Anggota
215	Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Sorong	Anggota
216	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama	Anggota
217	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mayboat	Anggota
218	Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)	Anggota
219	Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah (BAN-SM)	Anggota
220	Direktur SEAMEO QITEP IPA	Anggota
221	Direktur SEAMEO QITEP Matematika	Anggota
222	Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Anggota
223	Sesjen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Anggota
224	Kemenag 3	Anggota
225	Kemenag 5	Anggota
226	Narasumber Kurikulum 1	Anggota
227	Narasumber Kurikulum 2	Anggota
228	Narasumber Kurikulum 3	Anggota
229	Narasumber Kurikulum 7	Anggota
230	Narasumber Kurikulum 8	Anggota
231	Kepala Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program, BPKLN	Koordinator Substansi
232	Kabag. Perencanaan Ditjen PAUDNI	Anggota Tim Substansi
233	Kabag. Perencanaan Ditjen Pendidikan Dasar	Anggota Tim Substansi
234	Kabag. Perencanaan BPP Bahasa	Anggota Tim Substansi
235	Nurwin	Anggota Tim Substansi
236	Tri Wahyuningsih	Notula
237	Titik Indari	Notula
238	M. Israr	Notula
239	Waluyo	Notula
240	Suroso	Notula
241	Feby Sutanto	Notula
242	Siti Marfiah	IT

**DAFTAR PESERTA KOMISI I
PERSIAPAN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN KURIKULUM 2013
SUBKOMISI I-B (PENYIAPAN BUKU)**

TEMPAT : AULA 2 PANCASILA LT. 2

NO	PEJABAT	TUGAS
1	Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan	Ketua Komisi
2	Plt. Dirjen Pendidikan Dasar	Koordinator Perumus
3	Kepala Balitbang	Anggota Tim Perumus
4	Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota Tim Perumus
5	Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan	Anggota Tim Perumus
6	Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar	Anggota Tim Perumus
7	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota Tim Perumus
8	Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	Anggota Tim Perumus
9	Direktur Pembinaan Sekolah Dasar	Anggota Tim Perumus
10	Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Anggota Tim Perumus
11	Direktur Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Anggota Tim Perumus
12	Direktur Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar	Anggota Tim Perumus
13	Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	Anggota Tim Perumus
14	Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan	Anggota Tim Perumus
15	Inspektur II	Anggota Tim Perumus
16	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Anggota
17	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar	Anggota
18	Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulut	Anggota
19	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota
20	Rektor Universitas Nusa Cendana	Anggota
21	Rektor Universitas Tadulako	Anggota
22	Rektor Universitas Pattimura	Anggota
23	Rektor Universitas Trunojoyo Madura	Anggota
24	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten	Anggota
25	Kopertis Wilayah VII	Anggota
26	Kopertis Wilayah VIII	Anggota
27	Kopertis Wilayah IX	Anggota
28	Kopertis Wilayah XII	Anggota
29	Direktur Politeknik Negeri Kupang	Anggota
30	Pj. Direktur Politeknik Negeri Ambon	Anggota
31	Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah	Anggota
32	Kepala LPMP Riau	Anggota
33	Kepala LPMP Sumatra Selatan	Anggota
34	Kepala LPMP Bengkulu	Anggota
35	Kepala LPMP Lampung	Anggota
36	Kepala LPMP DKI Jakarta	Anggota
37	Kepala LPMP Jawa Barat	Anggota
38	Kepala LPMP Jawa Tengah	Anggota
39	Kepala LPMP Kalimantan Selatan	Anggota
40	Kepala LPMP Sulawesi Utara	Anggota
41	Kepala BP-PNFI-Regional III Medan	Anggota
42	Kepala BP-PNFI-Regional I Bandung	Anggota
43	Kepala BP-PNFI-Regional VI Banjarmasin	Anggota

NO	PEJABAT	TUGAS
44	Kepala Balai Bahasa Banda Aceh	Anggota
45	Kepala Balai Pengembangan Media Radio	Anggota
46	Kepala Balai Pengembangan Media Televisi, Surabaya	Anggota
47	Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Washington DC	Anggota
48	Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Paris	Anggota
49	Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Berlin	Anggota
50	Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Bangkok	Anggota
51	Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Tokyo	Anggota
52	Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Port Moresby	Anggota
53	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen	Anggota
54	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya	Anggota
55	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya	Anggota
56	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah	Anggota
57	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subulussalam	Anggota
58	Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai	Anggota
59	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi	Anggota
60	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun	Anggota
61	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir	Anggota
62	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pak Pak Barat	Anggota
63	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan	Anggota
64	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat	Anggota
65	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pariaman	Anggota
66	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman	Anggota
67	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok	Anggota
68	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
69	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
70	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
71	Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi	Anggota
72	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin	Anggota
73	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo	Anggota
74	Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh	Anggota
75	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	Anggota
76	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar	Anggota
77	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu	Anggota
78	Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam	Anggota
79	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna	Anggota
80	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan	Anggota
81	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muko Muko	Anggota
82	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah	Anggota
83	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung	Anggota
84	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah	Anggota
85	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat	Anggota
86	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang	Anggota
87	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin	Anggota
88	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota
89	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Timur	Anggota
90	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Selatan	Anggota
91	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang	Anggota
92	Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Seribu	Anggota
93	Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Jakarta Pusat	Anggota
94	Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Utara	Anggota
95	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak	Anggota

NO	PEJABAT	TUGAS
96	Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon	Anggota
97	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis	Anggota
98	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka	Anggota
99	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara	Anggota
100	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora	Anggota
101	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan	Anggota
102	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang	Anggota
103	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal	Anggota
104	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga	Anggota
105	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung	Anggota
106	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen	Anggota
107	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar	Anggota
108	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo	Anggota
109	Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang	Anggota
110	Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo	Anggota
111	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo	Anggota
112	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik	Anggota
113	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto	Anggota
114	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep	Anggota
115	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	Anggota
116	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan	Anggota
117	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang	Anggota
118	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Anggota
119	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman	Anggota
120	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak	Anggota
121	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau	Anggota
122	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang	Anggota
123	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang	Anggota
124	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau	Anggota
125	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara	Anggota
126	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
127	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin	Anggota
128	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Baru	Anggota
129	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar	Anggota
130	Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya	Anggota
131	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	Anggota
132	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur	Anggota
133	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Barat	Anggota
134	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamara	Anggota
135	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas	Anggota
136	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
137	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya	Anggota
138	Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan	Anggota
139	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
140	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir	Anggota
141	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan	Anggota
142	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan	Anggota
143	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat	Anggota
144	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung	Anggota
145	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jembrana	Anggota
146	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten K'ungking	Anggota
147	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem	Anggota

NO	PEJABAT	TUGAS
148	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat	Anggota
149	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa	Anggota
150	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
151	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan	Anggota
152	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor	Anggota
153	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai	Anggota
154	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur	Anggota
155	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada	Anggota
156	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur	Anggota
157	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara	Anggota
158	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagekeo	Anggota
159	Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado	Anggota
160	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung	Anggota
161	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tomohon	Anggota
162	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa	Anggota
163	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara	Anggota
164	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bolaang Mongondau Selatan	Anggota
165	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondau Timur	Anggota
166	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pare-Pare	Anggota
167	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai	Anggota
168	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto	Anggota
169	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Anggota
170	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara	Anggota
171	Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu	Anggota
172	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala	Anggota
173	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Poso	Anggota
174	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toli-Toli	Anggota
175	Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari	Anggota
176	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wakatobi	Anggota
177	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara	Anggota
178	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara	Anggota
179	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo	Anggota
180	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru	Anggota
181	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat	Anggota
182	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate	Anggota
183	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara	Anggota
184	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur	Anggota
185	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula	Anggota
186	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tidore Kepulauan	Anggota
187	Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura	Anggota
188	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
189	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat	Anggota
190	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai	Anggota
191	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor	Anggota
192	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara	Anggota
193	Kepala Dinas Pendidk. & Kebudayaan Kabupaten Memberamo Raya	Anggota
194	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya	Anggota
195	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo	Anggota
196	Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Manokwari	Anggota
197	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat	Anggota
198	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana	Anggota
199	Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)	Anggota

NO	PEJABAT	TUGAS
200	Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF)	Anggota
201	Direktur SEAMEO SEAMOLEC	Anggota
202	Direktur SEAMEO QITEP Bahasa	Anggota
203	Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI)	Anggota
204	Sesjen Ikatan Guru Indonesia (IGI)	Anggota
205	Kepala LPMP Sulawesi Barat	Anggota
206	Kemenag 4	Anggota
207	Kemenag 6	Anggota
208	Narasumber Kurikulum 4	Anggota
209	Narasumber Kurikulum 5	Anggota
210	Narasumber Kurikulum 6	Anggota
211	Narasumber Kurikulum 9	Anggota
212	Narasumber Kurikulum 10	Anggota
213	Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, BPKLN	Koordinator Substansi
214	Kabag. Perencanaan Balitbang	Anggota Tim Substansi
215	Kabag. Perencanaan BPSDM Pendidikan dan PMP	Anggota Tim Substansi
216	Luluk Budiono	Anggota Tim Substansi
217	Sumarnah	Anggota Tim Substansi
218	Amalia F	Notula
219	Dirhamsyah	Notula
220	Ema Hayati	Notula
221	Diana Sari	Notula
222	Inu Kertapati	IT

**DAFTAR PESERTA KOMISI II
MELAKSANAKAN AMANAT UU 12/2012 (AKADEMI KOMUNITAS DAN BOPTN)**

TEMPAT : RUANG BUDAYA KECIL LT. 2

NO	PEJABAT	TUGAS
1	Dirjen Pendidikan Tinggi	Ketua Komisi
2	Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi	Koordinator Perumus
3	Staf Ahli Menteri Bidang Hukum	Anggota Tim Perumus
4	Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama	Anggota Tim Perumus
5	Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Anggota Tim Perumus
6	Direktur Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota Tim Perumus
7	Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Anggota Tim Perumus
8	Kepala Pusat Penilaian Pendidikan	Anggota Tim Perumus
9	Kepala Pusat Penelitian Kebijakan	Anggota Tim Perumus
10	Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Badan Bahasa	Anggota Tim Perumus
11	Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi	Anggota Tim Perumus
12	Inspektur III	Anggota Tim Perumus
13	Rektor Universitas Syiahkuala Banda Aceh	Anggota
14	Rektor Universitas Sumatera Utara Medan (BHMN)	Anggota
15	Rektor Universitas Riau	Anggota
16	Rektor Universitas Andalas Padang	Anggota
17	Rektor Universitas Sriwijaya	Anggota
18	Rektor Universitas Bengkulu	Anggota
19	Rektor Universitas Lampung	Anggota
20	Rektor Universitas Indonesia Jakarta (BHMN)	Anggota
21	Rektor Institut Pertanian Bogor (BHMN)	Anggota
22	Rektor Universitas Pajajaran Bandung	Anggota
23	Rektor Institut Teknologi Bandung (BHMN)	Anggota
24	Rektor Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Anggota
25	Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta	Anggota
26	Rektor Universitas Airlangga Surabaya	Anggota
27	Rektor Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya	Anggota
28	Rektor Universitas Brawijaya Malang	Anggota
29	Rektor Universitas Udayana Bali	Anggota
30	Rektor Universitas Mataram	Anggota
31	Rektor Universitas Lambung Mangkurat	Anggota
32	Rektor Universitas Haluoleo	Anggota
33	Rektor Universitas Terbuka	Anggota
34	Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau	Anggota
35	Rektor Universitas Borneo Tarakan	Anggota
36	Rektor Universitas Musamus Merauke	Anggota
37	Rektor ISI Yogyakarta	Anggota
38	Kopertis Wilayah III, Jakarta	Anggota
39	Kopertis Wilayah X	Anggota
40	Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe	Anggota
41	Direktur Politeknik Negeri Padang	Anggota
42	Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya	Anggota
43	Direktur Politeknik Negeri Bandar Lampung	Anggota
44	Direktur Politeknik Negeri Jakarta	Anggota
45	Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bandung	Anggota
46	Direktur Politeknik Negeri Semarang	Anggota
47	Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	Anggota

48	Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	Anggota
49	Direktur Politeknik Negeri Malang	Anggota
50	Direktur Politeknik Pertanian Negeri Jember	Anggota
51	Direktur Politeknik Negeri Pontianak	Anggota
52	Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin	Anggota
53	Pj. Direktur Politeknik Negeri Samarinda	Anggota
54	Direktur Politeknik Negeri Denpasar	Anggota
55	Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Anggota
56	Direktur Politeknik Negeri Manado	Anggota
57	Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang	Anggota
58	Direktur Politeknik Negeri Tual	Anggota
59	Direktur Politeknik Media Kreatif Jakarta	Anggota
60	Direktur Politeknik Negeri Batam	Anggota
61	Direktur Politeknik Negeri Bengkalis	Anggota
62	Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara	Anggota
63	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara	Anggota
64	Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa	Anggota
65	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya	Anggota
66	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota
67	Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga	Anggota
68	Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli	Anggota
69	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara	Anggota
70	Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang	Anggota
71	Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	Anggota
72	Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang	Anggota
73	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmas Raya	Anggota
74	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan	Anggota
75	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis	Anggota
76	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan	Anggota
77	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun	Anggota
78	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur	Anggota
79	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong	Anggota
80	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang	Anggota
81	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji	Anggota
82	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu	Anggota
83	Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Jakarta Selatan	Anggota
84	Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan	Anggota
85	Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi	Anggota
86	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung	Anggota
87	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya	Anggota
88	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung	Anggota
89	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat	Anggota
90	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya	Anggota
91	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal	Anggota
92	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta	Anggota
93	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus	Anggota
94	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang	Anggota
95	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen	Anggota
96	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri	Anggota
97	Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun	Anggota
98	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun	Anggota
99	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung	Anggota
100	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota
101	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan	Anggota

102	Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Penajam Pasir Utara	Anggota
103	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
104	Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang	Anggota
105	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang	Anggota
106	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ende	Anggota
107	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata	Anggota
108	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo	Anggota
109	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang	Anggota
110	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paliwali Mandar	Anggota
111	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa	Anggota
112	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana	Anggota
113	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Anggota
114	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah	Anggota
115	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen	Anggota
116	Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	Anggota
117	Ketua Majelis Penelitian Dewan Pendidikan Tinggi	Anggota
118	Ketua Majelis Pengembangan Dewan Pendidikan Tinggi	Anggota
119	Ketua Majelis Pendidikan Dewan Pendidikan Tinggi	Anggota
120	Kabag. Perencanaan Ditjen Pendidikan Tinggi	Koordinator Substansi
121	Isyam Yuni Astuti	Anggota Tim Substansi
122	Nur Amiaty	Anggota Tim Substansi
123	Nining Sunarsih	Notula
124	Agustina Sandra Bunga	Notula
125	Nunny Febriana	Notula
126	Imron	Notula
127	Edy Sukartomo	Notula
128	Rennel Indrawan	Notula
129	Nurma	IT

**DAFTAR PESERTA KOMISI III
MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA**

TEMPAT : RUANG GANESHA/PERPUSTAKAAN

NO	PEJABAT	TUGAS
1	Wakil Mendikbud Bidang Kebudayaan	Ketua Komisi
2	Plt. Dirjen Kebudayaan	Koordinator Perumus
3	Staf Ahli Menteri Bidang Budaya dan Psikologi Pendidikan	Anggota Tim Perumus
4	Sekretaris Ditjen Kebudayaan	Anggota Tim Perumus
5	Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota Tim Perumus
6	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan	Anggota Tim Perumus
7	Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan	Anggota Tim Perumus
8	Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota Tim Perumus
9	Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman	Anggota Tim Perumus
10	Direktur Sejarah dan Nilai Budaya	Anggota Tim Perumus
11	Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	Anggota Tim Perumus
12	Direktur Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Anggota Tim Perumus
13	Kepala Museum Nasional	Anggota Tim Perumus
14	Kepala Galeri Nasional	Anggota Tim Perumus
15	Kepala Lembaga Sensor Film	Anggota Tim Perumus
16	Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional	Anggota Tim Perumus
17	Inspektur I	Anggota Tim Perumus
18	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta	Anggota
19	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB	Anggota
20	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku	Anggota
21	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali	Anggota
22	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalimantan Barat	Anggota
23	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Prov. Gorontalo	Anggota
24	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalimantan Timur	Anggota
25	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulawesi Selatan	Anggota
26	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulawesi Tengah	Anggota
27	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalimantan Tengah	Anggota
28	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	Anggota
30	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu	Anggota
31	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Papua	Anggota
32	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
33	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Anggota
34	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Anggota
35	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Bangka Belitung	Anggota
36	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalimantan Selatan	Anggota
37	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat	Anggota
38	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTT	Anggota
39	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	Anggota
40	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara	Anggota
41	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
42	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau	Anggota
43	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulawesi Tenggara	Anggota
44	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten	Anggota
45	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat	Anggota

NO	PEJABAT	TUGAS
46	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Anggota
47	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NAD	Anggota
48	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulawesi Utara	Anggota
49	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulawesi Barat	Anggota
50	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku Utara	Anggota
51	Rektor Universitas Jambi	Anggota
52	Rektor Universitas Gajah Mada Yogyakarta (BHMN)	Anggota
53	Rektor ISI Surakarta	Anggota
54	Rektor ISI Denpasar	Anggota
55	Rektor ISI Padang Panjang	Anggota
56	Rektor STSI Bandung	Anggota
57	Pjs. Ketua Sekolah Tinggi Intelijen Negara	Anggota
58	Kepala Balai Bahasa Bandung	Anggota
59	Kepala Balai Bahasa Semarang	Anggota
60	Kepala Balai Bahasa Yogyakarta	Anggota
61	Kepala Balai Bahasa Denpasar	Anggota
62	Kepala Balai Bahasa Medan	Anggota
63	Kepala Balai Bahasa Pekanbaru	Anggota
64	Kepala Balai Bahasa Kepulauan Riau	Anggota
65	Kepala Balai Bahasa Jambi	Anggota
66	Kepala Balai Bahasa Palembang	Anggota
67	Kepala Balai Bahasa Bandar Lampung	Anggota
68	Kepala Balai Bahasa Bengkulu	Anggota
69	Kepala Balai Bahasa Bangka Belitung	Anggota
70	Kepala Balai Bahasa Pontianak	Anggota
71	Kepala Balai Bahasa Palangkaraya	Anggota
72	Kepala Balai Bahasa Banjarmasin	Anggota
73	Kepala Balai Bahasa Mataram	Anggota
74	Kepala Balai Bahasa Manado	Anggota
75	Kepala Balai Bahasa Palu	Anggota
76	Kepala Balai Bahasa Ujung Pandang	Anggota
77	Kepala Balai Bahasa Kendari	Anggota
78	Kepala Balai Bahasa Gorontalo	Anggota
79	Kepala Balai Bahasa Papua	Anggota
80	Kepala Balai Bahasa Banten	Anggota
81	Kepala Balai Bahasa Kupang	Anggota
82	Kepala Balai Bahasa Maluku	Anggota
83	Kepala Balai Bahasa Maluku Utara	Anggota
84	Kepala Balai Pengembangan Multimedia, Semarang-Jateng	Anggota
85	Atase Pendidikan dan Kebudayaan di London	Anggota
86	Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Cairo	Anggota
87	Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Riyadh	Anggota
88	Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Manila	Anggota
89	Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Canberra	Anggota
90	Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Beijing	Anggota
91	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
92	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang	Anggota
93	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo	Anggota
94	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan	Anggota
95	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo	Anggota
96	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makasar	Anggota
97	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang	Anggota

NO	PEJABAT	TUGAS
98	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima	Anggota
99	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekalongan	Anggota
100	Balai Arkeologi Provinsi di Denpasar	Anggota
101	Balai Arkeologi Provinsi di Yogyakarta	Anggota
102	Balai Arkeologi Provinsi di Bandung	Anggota
103	Balai Arkeologi Provinsi di Palembang	Anggota
104	Balai Arkeologi Provinsi di Manado	Anggota
105	Balai Arkeologi Provinsi di Medan	Anggota
106	Balai Arkeologi Provinsi di Makassar	Anggota
107	Balai Arkeologi Provinsi di Banjarmasin	Anggota
108	Balai Arkeologi Provinsi di Ambon	Anggota
109	Balai Arkeologi Provinsi di Jayapura	Anggota
110	Balai Konservasi Borobudur	Anggota
111	Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh	Anggota
112	Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar	Anggota
113	Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar	Anggota
114	Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo	Anggota
115	Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	Anggota
116	Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah	Anggota
117	Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar	Anggota
118	Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto	Anggota
119	Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda	Anggota
120	Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang	Anggota
121	Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate	Anggota
122	Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta	Anggota
123	Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon	Anggota
124	Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali	Anggota
125	Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh	Anggota
126	Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung	Anggota
127	Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura - Papua	Anggota
128	Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar	Anggota
129	Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado	Anggota
130	Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang	Anggota
131	Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak	Anggota
132	Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang	Anggota
133	Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta	Anggota
134	Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran	Anggota
135	Kantor Museum Basoeki Abdullah, Jakarta	Anggota
136	Kantor Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta	Anggota
137	Kantor Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta	Anggota
138	Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta	Anggota
139	Kantor Museum Sumpah Pemuda, Jakarta	Anggota
140	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang	Anggota
141	Kabag. Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Kebudayaan	Koordinator Substansi
142	Kepala Bagian Fasilitas Internasional, BPKLN	Anggota Tim Substansi
143	Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri, BPKLN	Anggota Tim Substansi
144	Pintra	Notula
145	Dyah Hani S	Notula
146	Adinanto Mahulaa	Notula
147	Hilda Suryani	Notula
148	Eliander KP	Notula
149	Agam Aji Husni	IT

**DAFTAR PESERTA KOMISI IV
PENGUATAN TATA KELOLA SUMBER DAYA PEMBANGUNAN KEMDIKBUD**

TEMPAT : AULA 3 PANCASILA LT. 1

NO	PEJABAT	TUGAS
1	Sekretaris Jenderal	Ketua Komisi
2	Kepala Biro Kepegawaian	Koordinator Perumus
3	Inspektur Jenderal	Anggota Tim Perumus
4	Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media	Anggota Tim Perumus
5	Kepala Biro Perencanaan dan KLN	Anggota Tim Perumus
6	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota Tim Perumus
7	Kepala Biro Umum	Anggota Tim Perumus
8	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Anggota Tim Perumus
9	Kepala Biro Keuangan	Anggota Tim Perumus
10	Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim Perumus
11	Tim RPP Balitbang	Anggota Tim Perumus
12	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi N.A.D	Anggota
13	Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumbar	Anggota
14	Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumsel	Anggota
15	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	Anggota
16	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng	Anggota
17	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel	Anggota
18	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalteng	Anggota
19	Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kaltim	Anggota
20	Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Sulteng	Anggota
21	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
22	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra	Anggota
23	Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua	Anggota
24	Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara	Anggota
25	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung	Anggota
26	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten	Anggota
27	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo	Anggota
28	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
29	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
30	Rektor Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Anggota
31	Rektor Universitas Diponegoro Semarang	Anggota
32	Rektor Universitas Jember	Anggota
33	Rektor Universitas Mulawarman	Anggota
34	Rektor Universitas Sam Ratulangi	Anggota
35	Rektor Universitas Hasanuddin	Anggota
36	Rektor Universitas Cendrawasih	Anggota
37	Rektor Universitas Negeri Makassar	Anggota
38	Rektor Universitas Bangka Belitung	Anggota
39	Kopertis Wilayah IV, Bandung	Anggota
40	Kopertis Wilayah VIII	Anggota
41	Kopertis Wilayah XI, Banjarmasin	Anggota
42	Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	Anggota
43	Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	Anggota
44	Direktur Politeknik Negeri Kupang	Anggota
45	Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	Anggota
46	Direktur Politeknik Negeri Balikpapan	Anggota
47	Kepala LPMP Sulawesi Tengah	Anggota

NO	PEJABAT	TUGAS
48	Kepala LPMP Sulawesi Selatan	Anggota
49	Kepala LPMP Gorontalo	Anggota
50	Kepala BP-PNFI-Regional VIII Jayapura	Anggota
51	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai	Anggota
52	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci	Anggota
53	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kep. Meranti	Anggota
54	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu	Anggota
55	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar	Anggota
56	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Timur	Anggota
57	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja	Anggota
58	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju	Anggota
59	Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo	Anggota
60	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
61	Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Merauke	Anggota
62	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai	Anggota
63	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tamboaw	Anggota
64	LSM	Anggota
65	APTISI	Anggota
66	Direktur Politeknik Negeri Maritim negeri Indonesia	Anggota
67	Kepala Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi	Anggota
68	Kabag. Perencanaan Inspektorat Jenderal	Koordinator Substansi
69	Kabag. Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Jenderal	Anggota Tim Substansi
70	Kabag. BMN	Anggota Tim Substansi
71	Rubadi	Anggota Tim Substansi
72	GAAM Sekar	Anggota Tim Substansi
73	M. Rifan	Anggota Tim Substansi
74	M. Khaeroni	Notula
75	Ekaptining Prihatini	Notula
76	Arief Budiman	Notula
77	Erika Sirait	Notula
78	Nandana Bhaswara	IT

**DAFTAR PESERTA KOMISI V
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU)**

TEMPAT : GEDUNG MERAH PUTIH

NO	PEJABAT	TUGAS
1	Dirjen Pendidikan Menengah	Ketua Komisi
2	Sekretaris Ditjen Pendidikan Menengah	Koordinator Perumus
3	Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan	Anggota Tim Perumus
4	Staf Khusus Menteri Bidang Kajian Sistem Evaluasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Anggota Tim Perumus
5	Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Menengah	Anggota Tim Perumus
6	Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan	Anggota Tim Perumus
7	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota Tim Perumus
8	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Anggota Tim Perumus
9	Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat	Anggota Tim Perumus
10	Inspektur Investigasi	Anggota Tim Perumus
11	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	Anggota
12	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Anggota
13	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jatim	Anggota
14	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku	Anggota
15	Rektor Universitas Palangkaraya	Anggota
16	Rektor Universitas Khairun Ternate	Anggota
17	Kopertis Wilayah V	Anggota
18	Kepala LPMP Kalimantan Tengah	Anggota
19	Kepala LPMP Nusa Tenggara Timur	Anggota
20	Kepala LPMP Maluku	Anggota
21	Kepala LPMP Bangka Belitung	Anggota
22	Kepala BP-PNFI-Regional II Semarang	Anggota
23	Kepala BP-PNFI-Regional IV Surabaya	Anggota
24	Kepala BP-PNFI-Regional V Makasar	Anggota
25	Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Kuala Lumpur	Anggota
26	Atase Pendidikan dan Kebudayaan di New Delhi	Anggota
27	Kepala Dinas Pendidikan Kota Sabang	Anggota
28	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar	Anggota
29	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur	Anggota
30	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
31	Kepala Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe	Anggota
32	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues	Anggota
33	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
34	Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan	Anggota
35	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar	Anggota
36	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi	Anggota
37	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pinang	Anggota
38	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan	Anggota
39	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara	Anggota
40	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu	Anggota
41	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan	Anggota
42	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo	Anggota
43	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias	Anggota
44	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan	Anggota
45	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara	Anggota
46	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota

NO	PEJABAT	TUGAS
47	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi	Anggota
48	Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
49	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam	Anggota
50	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Anggota
51	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun	Anggota
52	Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai	Anggota
53	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
54	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga	Anggota
55	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Anambas	Anggota
56	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
57	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong	Anggota
58	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah	Anggota
59	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka	Anggota
60	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung	Anggota
61	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
62	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan	Anggota
63	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota
64	Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih	Anggota
65	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu	Anggota
66	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim	Anggota
67	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat	Anggota
68	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas	Anggota
69	Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Jakarta Utara	Anggota
70	Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timur	Anggota
71	Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat	Anggota
72	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang	Anggota
73	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang	Anggota
74	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang	Anggota
75	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor	Anggota
76	Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok	Anggota
77	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi	Anggota
78	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar	Anggota
79	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor	Anggota
80	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi	Anggota
81	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang	Anggota
82	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Anggota
83	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi	Anggota
84	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang	Anggota
85	Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga	Anggota
86	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	Anggota
87	Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang	Anggota
88	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan	Anggota
89	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara	Anggota
90	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Anggota
91	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
92	Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu	Anggota
93	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan	Anggota
94	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang	Anggota
95	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro	Anggota
96	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri	Anggota
97	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi	Anggota
98	Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	Anggota

NO	PEJABAT	TUGAS
99	Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	Anggota
100	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo	Anggota
101	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul	Anggota
102	Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang	Anggota
103	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang	Anggota
104	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak	Anggota
105	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi	Anggota
106	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	Anggota
107	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
108	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
109	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota
110	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
111	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan	Anggota
112	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan	Anggota
113	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur	Anggota
114	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur	Anggota
115	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau	Anggota
116	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar	Anggota
117	Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram	Anggota
118	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu	Anggota
119	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Lombok Utara	Anggota
120	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka	Anggota
121	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belu	Anggota
122	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
123	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
124	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota
125	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota
126	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Talaud	Anggota
127	Kepala Dinas Dikpora Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)	Anggota
128	Kepala Dinas Pendidikan Kotamobagu	Anggota
129	Kepala Dinas Pendidikan Kota Makasar	Anggota
130	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar	Anggota
131	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng	Anggota
132	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenrang Rappang	Anggota
133	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa	Anggota
134	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros	Anggota
135	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru	Anggota
136	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng	Anggota
137	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara	Anggota
138	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai	Anggota
139	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali	Anggota
140	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutung	Anggota
141	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tojo Una-Una	Anggota
142	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga Kab. Poliwali Mandar	Anggota
143	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau	Anggota
144	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna	Anggota
145	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka	Anggota
146	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe	Anggota
147	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan	Anggota
148	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara	Anggota
149	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango	Anggota
150	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato	Anggota

NO	PEJABAT	TUGAS
151	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah	Anggota
152	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara	Anggota
153	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual	Anggota
154	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan	Anggota
155	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Barat Daya	Anggota
156	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak Jaya	Anggota
157	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya	Anggota
158	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarmi	Anggota
159	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerrom	Anggota
160	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang	Anggota
161	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahokimo	Anggota
162	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel	Anggota
163	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori	Anggota
164	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dogiyai	Anggota
165	Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Sorong	Anggota
166	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Manokwari	Anggota
167	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Fak-Fak	Anggota
168	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan	Anggota
169	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
170	Direktur SEAMEO BIOTROP	Anggota
171	Direktur SEAMEO TROPMED	Anggota
172	DPP HIPKI	Anggota
173	DPP HISPPi	Anggota
174	Kemenag 1	Anggota
175	Kemenag 2	Anggota
176	Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Ditjen Dikmen	Koordinator Substansi
177	Wellem Pongtuluran	Anggota Tim Substansi
178	James Bangga	Anggota Tim Substansi
179	Desi Elvera Dewi	Notula
180	Maria Magdalena	Notula
181	Indah	Notula
182	Dewi Shinto Bundo	Notula
183	Novanda P. Judha	IT

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 023 /P/2013

TENTANG

REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014 mengamanatkan terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas komprehensif;
- b. bahwa terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- c. bahwa untuk koordinasi dan keserasian dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan nasional, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 - 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1134);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2013.
- PERTAMA :** Menyelenggarakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Rembuk Nasional pada tanggal 10 sampai dengan 13 Februari 2013 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tema "Menuntaskan Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 - 2014".

- KEDUA : Penyelenggaraan Rembuk Nasional bertujuan :
- a. mengevaluasi pelaksanaan program dan pencapaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2012;
 - b. memantapkan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2013;
 - c. merumuskan kebijakan tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014;
- KETIGA : Membentuk Panitia Rembuk Nasional yang terdiri atas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Panitia Pengarah bertugas :
- a. memberikan pengarahan dan informasi yang diperlukan untuk keberhasilan penyelenggaraan Rembuk Nasional; dan
 - b. memberikan pengarahan mengenai substansi Rembuk Nasional.
- KELIMA : Panitia Pelaksana bertugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan Rembuk Nasional;
 - b. menyelenggarakan Rembuk Nasional; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Rembuk Nasional kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEENAM : (1) Ketua Panitia Pelaksana Rembuk Nasional bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Rembuk Nasional dan membagi tugas kepada seksi-seksi
- (2) Memberikan wewenang kepada Ketua Panitia Pelaksana Rembuk Nasional untuk:
- a. mengadakan hubungan dengan instansi pemerintah, badan swasta, dan/atau perorangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - b. mengangkat beberapa anggota seksi sesuai dengan keperluan.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Muslih, SH
NIP 195809151985031001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 023/P/2013
TENTANG
REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2013**

PANITIA REMBUK NASIONAL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
I	Panitia Pengarah Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan		
1	Mohammad Nuh	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Pelindung
2	Musliar Kasim	Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan	Pengarah
3	Wiendu Nuryanti	Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan	Pengarah
4	Haryono Umar	Inspektur Jenderal	Pengarah
5	Lydia Freyani Hawadi	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	Pengarah
7	Djoko Santoso	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Pengarah
8	Kacung Marijan	Plt. Direktur Jenderal Kebudayaan	Pengarah
9	Khairil Anwar Notodiputro	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Pengarah
10	Mahsun	Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Pengarah
11	Syawal Gultom	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Pengarah
12	Anna Erliyana	Staf Ahli Menteri Bidang Hukum	Pengarah

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
13	Taufik Hanafi	Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan	Pengarah
14	Abdullah Alkaff	Staf Ahli Menteri Bidang Organisasi dan Manajemen	Pengarah
15	Sukemi	Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media	Pengarah
16	A. Hanief Saha Ghafur	Staf Khusus Menteri Bidang Sistem Evaluasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Pengarah
17	Komaruddin	Staf Khusus Menteri Bidang Kebudayaan	Pengarah
II Panitia Pelaksana Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan			
1	Ainun Na'im	Sekretaris Jenderal	Ketua
2	Suyanto	Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar	Wakil Ketua 1
3	Hamid Muhammad	Direktur Jenderal Pendidikan Menengah	Wakil Ketua 2
A. Seksi Substansi			
1	Ananto Kusuma Seta	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri	Ketua
2	Thamrin Kasman	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	Wakil Ketua 1
3	M. Mustaghfirin Amin	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah	Wakil Ketua 2
4	Budi Purwaka	Kepala Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri	Sekretaris
5	Gogot Suharwoto	Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri	Wakil Sekretaris

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
6	Hindun Basri Purba	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
7	Gutama	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal	Anggota
8	Patdono Suwignjo	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Anggota
9	Hendarman	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
10	Yeyen Maryani	Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
11	Abi Sujak	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Anggota
12	Gatot Ghautama	Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan	Anggota
B. Seksi Penyelenggara			
1	Mohammad Qodrat Wisnu Aji	Kepala Biro Umum	Ketua
2	Muhammad Hatta	Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan	Wakil Ketua 1
3	Ari Santoso	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	Wakil Ketua 2
4	Wahyu Nugroho Senoaji	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian Biro Umum	Sekretaris
5	Yeni Suciani	Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Biro Umum	Ketua Sub Seksi Keuangan
6	Berny Syam	Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol Biro Umum	Ketua Sub Seksi Protokol dan Pembicara Tamu

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
7	Parji	Kepala Subbagian Urusan Dalam Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian Biro Umum	Ketua Sub Seksi Angkutan dan Keamanan
8	Mansur Fauzi	Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan	Ketua Sub Seksi Akomodasi/Konsumsi
9	Agus Wahyu S.	Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Pimpinan dan Pegawai Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan	Ketua Sub Seksi Persidangan, Notula dan Tim Perumus
10	Setiono	Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Sub Seksi Penerangan dan Dokumentasi
11	Suryanta	Kepala Bagian pada Korpri Setjen Kemdikbud	Ketua Sub Seksi Kesehatan dan Kesegaran Jasmani
12	M. Rizal	Kepala Subbagian Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Barang Milik Negara Biro Umum	Ketua Sub Seksi Perlengkapan
13	Monang Sinambela	Kepala Bidang Pengembangan Jejaring Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	Ketua Sub Seksi Teknologi Informasi

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

(d/h PUSDIKLAT PEGAWAI KEMDIKNAS)

Jln. Raya Cinangka Km. 19

Bojongsari - Kota Depok

Tlp : 021.7490410 - 021.7490411

Faks : 021.7491174



Keterangan Gambar :

- | | |
|--|-------------------------|
| A : Gedung Pancasila | L : Asrama Ramayana |
| B : Gedung Garuda
(pembukaan, Pleno, Penutupan) | M : Masjid Al-Huda |
| C : Gedung Merah Putih
(Pendaftaran) | N : Lapangan Tenis |
| D : Gedung Fatahilah | O : Gardu Listrik |
| E : Gedung Ganesha (Perpustakaan) | P : Kolam Pemancingan |
| F : Gedung Budaya | Q : Pos Penjagaan |
| G : Gedung Paramitha (Kantin) | R : Gazebo |
| H : Gedung Nusantara | S : Parkir Mobil |
| I : Gedung Puntadewa | T : Lapangan Volli |
| J : Gedung Bharata | U : Lapangan Sepak Bola |
| K : Gedung Bhineka Tunggal Ika | V : Poliklinik |

■ = Tempat Pelaksanaan Kegiatan Rembug Nasional 2012





Perpustakaan
Jenderal